

LANSKAP PENGETAHUAN ADMINISTRASI KEUANGAN PUBLIK: SEBUAH ANALISIS BIBLIOMETRIK INDONESIA DAN GLOBAL (2000–2025)

Anry Firmansyah¹; Ahmad Zaini Miftah²; Riky Satia Muharam³; Syifa Rachmania Komara⁴

^{1,2,3,4}*Public Finance Administration, Applied Science Department, School of Vocational Studies,
Universitas Padjadjaran
email : anry.firmansyah@unpad.ac.id*

Submitted: 09-07-2025; Accepted: 11-08-2025; Published : 12-08-2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi arah dan struktur kajian ilmiah mengenai administrasi keuangan publik dalam literatur ilmiah global melalui pendekatan bibliometrik terhadap 208 artikel yang terindeks di Scopus selama periode 2000 hingga pertengahan tahun 2025. Hasil analisis menunjukkan bahwa topik ini berkembang secara signifikan, ditandai dengan meningkatnya perhatian terhadap isu transparansi, desentralisasi fiskal, efisiensi anggaran, serta integrasi teknologi informasi dalam tata kelola fiskal. Visualisasi menggunakan *VOSviewer* dalam bentuk *keyword co-occurrence mapping* mengungkap bahwa istilah *public finance* dan *public administration* merupakan simpul utama yang saling terhubung dengan konsep seperti *fiscal policy*, *governance*, dan *accountability*. Temuan juga mengindikasikan adanya pergeseran pendekatan riset dari orientasi teknokratis menuju paradigma kolaboratif dan berbasis data. Studi ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan, tata kelola audit yang independen, serta adopsi teknologi yang inklusif sebagai prasyarat penting bagi reformasi administrasi keuangan publik yang berkelanjutan, terutama di era digital dan pasca-krisis global.

Kata kunci: administrasi keuangan publik, bibliometrik, fiskal, desentralisasi, teknologi informasi

ABSTRACT

This study aims to identify the direction and structure of scholarly discourse on public finance administration in the global academic literature by applying a bibliometric approach to 208 articles indexed in Scopus from 2000 to mid-2025. The analysis reveals that this topic has developed significantly, marked by growing attention to issues such as transparency, fiscal decentralization, budget efficiency, and the integration of information technology in fiscal governance. Visualization using VOSviewer, through keyword co-occurrence mapping, shows that public finance and public administration emerge as central nodes interconnected with concepts like fiscal policy, governance, and accountability. The findings also indicate a paradigm shift in research approaches—from a technocratic orientation toward more collaborative and data-driven frameworks. This study recommends strengthening institutional capacity, ensuring independent audit governance, and promoting inclusive technology adoption as essential prerequisites for sustainable public finance administration reform, especially in the digital era and the aftermath of global crises.

Keywords: *public finance administration, bibliometric, fiscal, decentralization, information technology*

PENDAHULUAN

Dalam dua puluh tahun terakhir, tuntutan terhadap transparansi, efisiensi, dan digitalisasi telah mendorong perubahan besar dalam cara negara-

negara mengelola keuangannya. Administrasi keuangan publik, yang mencakup penganggaran, pengadaan barang dan jasa, audit fiskal, serta akuntabilitas belanja negara, kini menjadi ujung

tombak reformasi tata kelola pemerintahan (Firmansyah et al., 2024; Judijanto et al., 2024). Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya ekspektasi publik, digitalisasi sistem keuangan telah menjadi strategi penting dalam memperbaiki kinerja fiskal, mencegah kebocoran anggaran, dan meningkatkan partisipasi publik dalam proses perencanaan keuangan (Gupta et al., 2018; IMF, 2017).

Reed dan Swain (2012) menegaskan bahwa sistem administrasi keuangan yang adaptif sangat diperlukan untuk menghadapi dinamika teknologi dan tekanan fiskal. Mereka juga menekankan pentingnya efisiensi, akuntabilitas, serta kemampuan institusi publik dalam menyesuaikan diri terhadap tantangan baru. Inovasi seperti e-budgeting, e-procurement, dan audit berbasis teknologi seperti big data dan blockchain kini diadopsi oleh banyak negara untuk memperkuat sistem pengawasan fiskal (O'Connor et al., 2020; Azizi et al., 2024). Pendekatan berbasis teknologi seperti GovTech bahkan semakin mendorong keterbukaan fiskal sebagai bagian dari transformasi struktural birokrasi yang selama ini sering dianggap lamban dan tertutup (Ciancarini et al., 2023).

Reformasi serupa juga terjadi di Indonesia. Sejak era reformasi dan penerapan desentralisasi fiskal, pemerintah secara bertahap memperkuat sistem administrasi keuangannya melalui transparansi APBN/APBD, digitalisasi pengadaan, serta reformasi sistem pelaporan dan audit (Oktaviyani & Kuntadi, 2023). Namun demikian, secara akademik, kontribusi Indonesia dalam literatur global mengenai administrasi keuangan publik masih belum terlihat dominan. Kajian sistematis yang memetakan bagaimana posisi, tren, serta fokus tematik Indonesia dalam percaturan riset global masih jarang ditemukan (Aswin et al., 2022). Hingga pertengahan tahun 2024, misalnya, hanya terdapat sejumlah kecil publikasi internasional yang secara spesifik mengevaluasi lanskap keilmuan ini, baik secara konseptual maupun metodologis.

Untuk menjawab kesenjangan tersebut, studi ini menggunakan pendekatan analisis bibliometrik terhadap 208 artikel ilmiah yang terindeks di Scopus pada periode 2000 hingga pertengahan 2025. Pendekatan bibliometrik dipilih karena mampu mengeksplorasi arah dan struktur pengetahuan melalui pemetaan tren publikasi, kolaborasi penulis dan institusi, serta relasi antar konsep dan tema yang berkembang di dalam literatur (Donthu et al., 2021; Aazami et al., 2020). Selain itu, visualisasi melalui *VOSviewer* dan pemetaan berbasis *keyword co-occurrence* juga digunakan untuk menggambarkan struktur tematik serta simpul utama dalam jaringan pengetahuan publikasi.

Berdasarkan itu, studi ini mengajukan empat pertanyaan penelitian utama:

1. (RQ1) Bagaimana tren dan dinamika publikasi administrasi keuangan publik antara tahun 2000 hingga pertengahan 2025?

2. (RQ2) Apa saja tema-tema utama dan bagaimana struktur pengetahuan yang terbentuk dari literatur tersebut?
3. (RQ3) Siapa saja penulis, institusi, dan negara yang paling berpengaruh dalam bidang ini secara global?
4. (RQ4) Bagaimana posisi dan kontribusi akademik Indonesia dalam lanskap global studi administrasi keuangan publik?

Dengan memadukan analisis kuantitatif dan pemetaan visual, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan potret komprehensif mengenai perkembangan keilmuan administrasi keuangan publik secara global, sekaligus menelaah secara kritis posisi akademik Indonesia di dalamnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan bibliometrik untuk memetakan lanskap pengetahuan dalam kajian administrasi keuangan publik selama periode 2000 hingga pertengahan tahun 2025. Pendekatan ini memungkinkan dilakukannya analisis kuantitatif terhadap literatur ilmiah guna mengidentifikasi tren publikasi, aktor utama, pola kolaborasi, serta perkembangan tema dalam rentang waktu yang luas (Donthu et al., 2021). Kerangka metodologi yang digunakan merujuk pada pendekatan empat langkah dari Fosso Wamba dan Mishra (2017), yang mencakup: (1) penentuan basis data dan kata kunci; (2) analisis awal terhadap hasil pencarian; (3) pemetaan jaringan bibliometrik; serta (4) analisis konseptual, tematik, dan historiografis. Kerangka ini telah banyak digunakan dalam kajian bibliometrik karena mampu menyajikan struktur keilmuan secara sistematis.

Untuk memperkuat pendekatan tersebut, penelitian ini juga mengikuti pedoman sistematik dari Donthu et al. (2021) yang menekankan transparansi metodologi, validitas data, serta akurasi dalam penggunaan alat bantu visualisasi dan analisis. Literatur dikumpulkan secara eksklusif dari database Scopus, yang dipilih karena cakupan dokumennya yang luas dan kendali indeksasi yang lebih ketat dibandingkan database lainnya seperti Web of Science atau Google Scholar (Mongeon & Paul-Hus, 2016; Garrido-Cardenas et al., 2020). Pengambilan data dilakukan hingga Juni 2025, dan hanya mencakup dokumen ilmiah berjenis *research article* dan *review article* yang telah dipublikasikan dalam bahasa Inggris. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kualitas serta kesetaraan dalam validasi akademik (Ramos-Rodriguez & Ruiz-Navarro, 2004).

Dalam proses seleksi, penelusuran dilakukan pada kolom *title*, *abstract*, dan *keywords* menggunakan kata kunci seperti: “public finance administration”, “public financial management”, “government budgeting”, dan “fiscal administration”. Selanjutnya, dari hasil pencarian awal, dilakukan penyaringan berdasarkan: (1) jenis dokumen (hanya artikel dan ulasan ilmiah); (2) kualitas jurnal, dengan

preferensi pada jurnal bereputasi yang masuk dalam kuartil Q1 dan Q2 versi Scimago; serta (3) relevansi tematik, yang ditentukan melalui evaluasi abstrak dan kata kunci. Dari seluruh hasil yang muncul, diperoleh 208 artikel yang memenuhi kriteria seleksi untuk dianalisis lebih lanjut.

Data bibliografis yang telah dikurasi kemudian diekspor dalam format CSV dan dianalisis menggunakan perangkat lunak VOSviewer (van Eck & Waltman, 2009). Program ini digunakan untuk memetakan jaringan kolaborasi (co-authorship), hubungan kutipan (co-citation), serta keterkaitan kata kunci (co-word analysis). Dalam visualisasi peta keyword, digunakan analisis co-occurrence dengan ambang minimal kemunculan sebanyak 5 kata kunci agar peta topik yang dihasilkan cukup representatif dan tidak terlalu tersebar. Sementara itu, analisis jaringan penulis menggunakan pendekatan co-authorship dengan batas minimal 2 publikasi untuk menggambarkan keterkaitan dan kontribusi kolaboratif dalam bidang ini.

Dengan mengintegrasikan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menyajikan pemetaan yang komprehensif terhadap struktur dan arah perkembangan studi administrasi keuangan publik. Analisis ini tidak hanya menggambarkan dinamika ilmiah di tingkat global, tetapi juga memungkinkan evaluasi terhadap kontribusi akademik Indonesia dalam wacana internasional yang terus berkembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

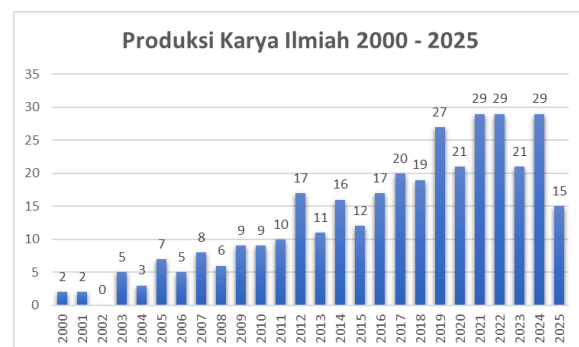
a. Temuan Utama

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan arah dan struktur kajian ilmiah mengenai administrasi keuangan publik dalam literatur ilmiah global, dengan penekanan khusus pada kontribusi akademik Indonesia. Analisis ini menggunakan 208 artikel ilmiah yang terindeks Scopus dalam periode 2000 hingga pertengahan 2025, dengan *cut-off* data pada Juni 2025 yang mencakup publikasi yang telah terbit maupun *online first*. Proses seleksi dilakukan dengan menyaring artikel berdasarkan jenis dokumen (*research article* dan *review*), kualitas jurnal (Q1–Q2), serta relevansi tematik terhadap topik administrasi keuangan publik. Sumber data utama adalah basis data Scopus, dipilih karena kelengkapan indeksasi dan kemampuannya merekam metadata publikasi secara konsisten pada tingkat global (Donthu et al., 2021; Miftah et al., 2025a). Analisis bibliometrik dilakukan menggunakan perangkat lunak VOSviewer dengan dua jenis analisis utama, yaitu *co-occurrence keyword mapping* (ambang minimal lima kemunculan kata kunci) dan *co-authorship mapping* untuk memetakan jejaring penulis.

Secara umum, produksi karya ilmiah di bidang administrasi keuangan publik mengalami peningkatan signifikan dalam dua dekade terakhir. Sebelum tahun 2010, jumlah publikasi per tahun relatif rendah, rata-rata di bawah lima artikel. Namun,

sejak 2010 terjadi peningkatan yang konsisten, dengan lonjakan mencolok pada tahun 2014 dan puncaknya pada tahun 2018 sebanyak 20 publikasi. Periode 2010–2018 ini bertepatan dengan gelombang digitalisasi sistem keuangan publik di berbagai negara, penguatan *fiscal transparency frameworks*, serta partisipasi aktif negara-negara berkembang dalam *Open Government Partnership*. Faktor-faktor tersebut memperluas ruang diskursus administrasi keuangan publik, terutama terkait modernisasi penganggaran berbasis kinerja, *open budget data*, dan integrasi sistem pengadaan publik (Miftah et al., 2025b; Donthu et al., 2021). Setelah puncak 2018, tren publikasi relatif stabil dengan sedikit fluktuasi—19 publikasi pada 2020, 17 publikasi pada 2024—meskipun tahun-tahun tersebut juga dipengaruhi oleh dinamika global seperti pandemi COVID-19 yang memicu kebijakan fiskal adaptif (Wamba & Mishra, 2017). Hingga pertengahan 2025, telah teridentifikasi 10 publikasi, yang diproyeksikan bertambah menjelang akhir tahun. Fakta bahwa hingga 2024 hanya terdapat kurang dari 150 artikel yang secara khusus memetakan lanskap keilmuan ini menegaskan adanya *gap* riset yang signifikan.

Gambar 1. Produksi Karya Ilmiah Bidang Administrasi Keuangan Publik (2000–2025)



Sumber : Database Scopus, 2025

Pemetaan penulis teratas mengidentifikasi Dubauskas, G. dan Santoro, F. sebagai kontributor paling produktif dengan tiga publikasi masing-masing pada periode 2000–2025. Keduanya berfokus pada isu-isu seperti reformasi fiskal, integrasi ekonomi sektor publik, dan efektivitas tata kelola. Penulis lainnya yang berkontribusi signifikan mencakup Bryson, P.J., Gerçek, A., de Mello, L., Kot, S., Shkolnyk, I., Pomeranz, D., Rodríguez Bolívar, M.P., dan Xu, G., yang masing-masing memiliki dua publikasi. Tema kajian mereka bervariasi mulai dari penguatan desentralisasi fiskal, optimalisasi sistem perpajakan, hingga implementasi anggaran berbasis kinerja di sektor kesehatan dan pendidikan. Analisis jejaring *co-authorship* mengungkap bahwa pusat-pusat pengetahuan global masih terkonsentrasi di Eropa Barat, sementara keterlibatan negara berkembang, termasuk Indonesia, masih terbatas. Kondisi ini mengindikasikan perlunya strategi kolaborasi riset yang lebih intensif lintas negara dan wilayah (Miftah et al., 2025a).

Tabel 1. Sepuluh Peneliti Teratas dalam Studi Administrasi Keuangan Publik (2000–2025)

No.	Penulis	Dok	Judul	Sumber	Tahun
1	Dubauskas, G.	3	The management of public finance literacy for sustainable economical environment	Journal of Security and Sustainability Issues	2016
	Dubauskas, G.		National finance sustainability perception - The evidence from the last crisis in Baltics	Journal of Security and Sustainability Issues	2018
	Dubauskas, G.		A potential influence of tax inequality on the sustainable public management	Journal of Security and Sustainability Issues	2019
2	Santoro, F.	3	To file or not to file? Another dimension of tax compliance - the Eswatini Taxpayers' survey	Journal of Behavioral and Experimental Economics	2021
	Mascagni, G., Santoro, F., Mukama, D., Karangwa, J., Hakizimana, N.		Active Ghosts: Nil-filing in Rwanda	World Development	2022
	Okunogbe, O., Santoro, F.		Increasing Tax Collection in African Countries: The Role of Information Technology	Journal of African Economies	2023
3	Bryson, P.J., Cornia, G.C.	2	Slovakia's surge: The new system's impact on fiscal decentralisation	Post Communist Economies	2006
	Bryson, P.J.		User fees in local finance: Performance and potential in the Czech Republic and Slovakia	Eastern European Economics	2008
4	Ipek, S., Gerçek, A.	2	Current Perspectives in Public Finance	Current Perspectives in Public Finance	2019
	Gerçek, A., Taş, M.		Critical Debates in Public Finance	Critical Debates in Public Finance	2020
5	de Mello, L., Jalles, J.T.	2	Decentralization and the environment: cross-country evidence	Applied Economics	2024
	de Mello, L., Jalles, J.T.		Local government and environmental policy: empirical evidence on the link between spending and regulation	Applied Economics	2025
6	Kot, S., Štefko, R., Dobrovič, J., Rajnoha, R., Váchal, J.	2	The main performance and effectiveness factors of sustainable financial administration reform using multidimensional statistical tools	Sustainability Switzerland	2019
	Tsindeliani, I., Kot, S., Vasilyeva, E., Narinyan, L.		Tax system of the Russian Federation: Current state and steps towards financial sustainability	Sustainability Switzerland	2019
7	Shkolnyk, I., Kozmenko, O., Nowacki, R. Merschii, B.	2	Dependence of the state of public finances on their transparency and the level of corruption in a country	Economics and Sociology	2020
	Shkolnyk, I., Kozmenko, S., Drahosova, J., Kozmenko, O., Aldiwani, K.		State budget revenue optimization using the simplex method	Journal of International Studies	2021
8	Pomeranz, D.	2	Impact Evaluation Methods in Public Economics: A Brief Introduction to Randomized Evaluations and Comparison with Other Methods	Public Finance Review	2017
	Pomeranz, D., Vila-Belda, J.		Taking State-Capacity Research to the Field: Insights from Collaborations with Tax Authorities	Annual Review of Economics	2019
9	Caba Pérez, C., López Hernández, A.M., Rodríguez Bolívar, M.P.	2	Citizens' access to on-line governmental financial information: Practices in the European Union countries	Government Information Quarterly	2005
	Rodríguez Bolívar, M.P., Navarro Galera, A., Alcaide Muñoz, L., López Subirés, M.D.		Factors influencing local government financial sustainability: An empirical study	Lex Localis	2014
10	Xu, G.	2	The costs of patronage: Evidence from the British Empire	American Economic Review	2018
	Xu, G.		The colonial origins of fiscal capacity: Evidence from patronage governors	Journal of Comparative Economics	2019

Sumber : Database Scopus, 2025

Dari sisi kanal publikasi, *International Review of Administrative Sciences* dan *Lex Localis* menjadi jurnal dengan jumlah publikasi terbanyak, masing-masing enam artikel. Kedua jurnal ini berperan penting sebagai forum akademik dalam membahas reformasi tata kelola publik, desentralisasi fiskal, dan inovasi penganggaran. Selanjutnya, *International Journal of Public Administration* dan

Public Administration and Development menempati urutan kedua dengan masing-masing empat artikel. Selain itu, jurnal seperti *Australian Journal of Public Administration*, *Journal of Security and Sustainability Issues*, *Politics and Policy*, *Public Administration*, *Public Budgeting and Finance*, dan *Sustainability Switzerland* memiliki tiga artikel masing-masing, menunjukkan sifat interdisipliner

publik di tingkat global maupun nasional. Tren peningkatan publikasi sejak 2010, yang tergambar jelas pada Gambar 1, menunjukkan bahwa topik administrasi keuangan publik semakin menjadi prioritas riset internasional. Lonjakan signifikan pada 2018 dapat dimaknai sebagai respons akademik terhadap gelombang kebijakan global, seperti penguatan *Open Government Partnership*, adopsi *Integrated Financial Management Information Systems* (IFMIS), dan penerapan *e-procurement* secara luas di negara berkembang (Donthu et al., 2021; Miftah et al., 2025b). Fakta ini menegaskan bahwa dinamika kebijakan dan reformasi kelembagaan di level global memiliki daya dorong langsung terhadap intensitas dan fokus riset di bidang ini.

Selanjutnya, dominasi penulis dari Eropa Barat sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1 dan hasil *co-authorship mapping* mencerminkan adanya ketimpangan dalam produksi pengetahuan global. Temuan ini sejalan dengan argumen Neff & Corley (2009) bahwa akses terhadap sumber daya riset, jaringan kolaborasi, dan pendanaan menjadi faktor penentu keterlibatan akademisi dalam literatur internasional. Bagi Indonesia, kondisi ini mengimplikasikan perlunya intervensi kebijakan riset yang tidak hanya meningkatkan jumlah publikasi, tetapi juga memperluas jejaring kolaborasi lintas negara agar pengetahuan yang dihasilkan memiliki daya saing global (Sutriadi & Miftah, 2020).

Struktur kanal publikasi yang diidentifikasi pada Tabel 2 juga memperlihatkan sifat multidisipliner dari administrasi keuangan publik. Jurnal-jurnal teratas tidak hanya berfokus pada kebijakan fiskal, tetapi juga menggabungkan perspektif keberlanjutan, inovasi tata kelola, dan isu keamanan publik. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa penelitian di bidang ini akan lebih relevan dan berdampak jika menggunakan pendekatan interdisipliner, yang menggabungkan dimensi ekonomi, teknologi informasi, manajemen publik, dan ilmu politik (van Eck & Waltman, 2009). Bagi akademisi Indonesia, strategi ini dapat memperluas peluang publikasi di jurnal bereputasi Q1–Q2 yang memiliki cakupan lintas disiplin.

Hasil analisis kata kunci (Gambar 2) dan kluster tematik (Gambar 3) memperlihatkan adanya pergeseran fokus kajian dari orientasi efisiensi teknokratik menuju tata kelola kolaboratif berbasis digital. Pergeseran ini konsisten dengan temuan Abdollahi et al. (2021) dan Colicchia et al. (2018) bahwa penerapan teknologi informasi mendorong pembaruan model tata kelola fiskal yang lebih partisipatif, transparan, dan adaptif. Dalam konteks kebijakan, hal ini mengimplikasikan bahwa pemerintah perlu mengintegrasikan teknologi digital dalam seluruh siklus keuangan publik, mulai dari perencanaan anggaran, pengelolaan kas, hingga pelaporan dan audit, untuk meningkatkan kepercayaan publik dan efisiensi fiskal.

Namun, kontribusi Indonesia yang masih terbatas dalam literatur internasional menegaskan adanya *knowledge gap* yang berpotensi menghambat posisi Indonesia dalam wacana global tentang reformasi fiskal. Sebagaimana ditunjukkan oleh Miftah et al. (2018), kendala ini seringkali terkait dengan keterbatasan pendanaan riset, akses terhadap basis data internasional, dan hambatan bahasa akademik. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya strategi peningkatan kapasitas publikasi, seperti pelatihan penulisan akademik berstandar internasional, kolaborasi dengan peneliti senior bereputasi, dan insentif publikasi di jurnal Q1–Q2.

Pola jejaring kolaborasi internasional yang terungkap melalui *co-authorship mapping* juga memperlihatkan bahwa pusat-pusat pengetahuan global cenderung terkonsentrasi pada institusi di negara maju. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa tanpa strategi penetrasi ke jaringan riset tersebut, negara berkembang akan sulit berperan sebagai *knowledge leader* di bidang administrasi keuangan publik (Donthu et al., 2021). Bagi Indonesia, hal ini berarti perlunya pendekatan strategis dalam membangun kemitraan riset jangka panjang, termasuk melalui program *visiting scholar*, penelitian kolaboratif yang didanai bersama, dan publikasi bersama di jurnal internasional.

Temuan mengenai pergeseran topik riset dan munculnya tema-tema baru seperti penggunaan teknologi digital dalam pengawasan fiskal membuka peluang untuk mengaitkan administrasi keuangan publik dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Pengalaman negara-negara yang menjadi pusat publikasi dalam bidang ini dapat menjadi model adaptasi kebijakan bagi Indonesia, khususnya dalam merancang reformasi fiskal yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

Selain itu, konsentrasi publikasi pada jurnal-jurnal tertentu (Tabel 2) mengimplikasikan adanya kecenderungan *gatekeeping* dalam penyebaran pengetahuan. Kondisi ini dapat memengaruhi arah riset global karena isu yang diprioritaskan oleh jurnal-jurnal tersebut akan lebih sering mendapat eksposur. Bagi Indonesia, hal ini menjadi pengingat bahwa strategi publikasi tidak hanya bergantung pada kualitas penelitian, tetapi juga pada pemilihan kanal publikasi yang tepat agar pesan penelitian dapat menjangkau audiens internasional yang relevan (Donthu et al., 2021). Dengan demikian, pemahaman terhadap peta jurnal dan kebijakan editorialnya menjadi bagian penting dari strategi riset nasional.

Lebih jauh lagi, pola pergeseran kata kunci dari *financial control* dan *efficiency* menuju *digital governance* dan *participatory budgeting* sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 2 dan Gambar 3 menegaskan bahwa riset administrasi keuangan publik semakin mengarah pada paradigma kolaboratif. Pergeseran ini sejalan dengan literatur yang menekankan pentingnya peran teknologi

sebagai fasilitator keterlibatan publik (Abdollahi et al., 2021; Colicchia et al., 2018). Dalam konteks Indonesia, hal ini memberikan landasan yang kuat untuk merumuskan kebijakan keuangan publik yang tidak hanya mengandalkan efisiensi internal, tetapi juga membangun legitimasi melalui keterlibatan masyarakat.

Akhirnya, rendahnya kontribusi akademisi Indonesia dalam publikasi Scopus memiliki implikasi strategis terhadap pembangunan kapasitas sumber daya manusia di bidang kebijakan fiskal. Minimnya keterlibatan ini tidak hanya berdampak pada terbatasnya pengaruh dalam diskursus akademik internasional, tetapi juga berpotensi memperlambat adopsi praktik terbaik (*best practices*) dari negara lain. Oleh karena itu, kebijakan afirmatif di sektor pendidikan tinggi yang memfasilitasi akses peneliti terhadap sumber daya internasional, baik berupa basis data, peluang kolaborasi, maupun pendanaan riset, menjadi langkah penting untuk memperkuat posisi Indonesia dalam wacana global (Miftah et al., 2018; Sutriadi & Miftah, 2020).

3. Rekomendasi dan Arah Riset

Berdasarkan temuan dan implikasi yang telah diuraikan, terdapat sejumlah rekomendasi strategis yang bersifat aplikatif untuk memperkuat kontribusi riset administrasi keuangan publik di tingkat global, sekaligus mendorong perbaikan praktik kebijakan fiskal di Indonesia. Salah satu langkah penting adalah penguatan kolaborasi riset internasional yang terarah dan berkelanjutan. Hasil *co-authorship mapping* memperlihatkan dominasi jaringan peneliti dari Eropa Barat, sementara kontribusi negara berkembang, termasuk Indonesia, masih terbatas (Tabel 1). Kondisi ini mengindikasikan bahwa untuk meningkatkan visibilitas global, akademisi Indonesia perlu aktif membangun kemitraan strategis melalui *joint research grants*, konferensi internasional, serta publikasi bersama dengan peneliti dari pusat-pusat pengetahuan global (Neff & Corley, 2009; Sutriadi & Miftah, 2020). Lembaga penelitian dan universitas di dalam negeri dapat memfasilitasi kerja sama tersebut dengan menyediakan skema pendanaan khusus, dukungan administratif, dan insentif bagi publikasi kolaboratif.

Penguatan kolaborasi tersebut akan semakin efektif jika diiringi dengan dorongan pada pendekatan interdisipliner dalam riset administrasi keuangan publik. Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa jurnal teratas yang mempublikasikan kajian ini mencakup bidang kebijakan publik, manajemen publik, keberlanjutan, dan keamanan. Oleh karena itu, penelitian di masa depan perlu mengintegrasikan dimensi ekonomi, teknologi informasi, manajemen, dan ilmu politik dalam kerangka analisisnya (van Eck & Waltman, 2009; Donthu et al., 2021). Misalnya, topik pengelolaan fiskal dapat dikaji bersamaan dengan penerapan *artificial intelligence* untuk deteksi

anomali anggaran atau analisis dampak *blockchain* pada transparansi pengadaan publik. Pendekatan lintas disiplin ini akan memperkaya metodologi, memperluas relevansi kajian, dan meningkatkan peluang publikasi di jurnal bereputasi Q1–Q2.

Upaya tersebut perlu ditopang oleh peningkatan kapasitas publikasi internasional yang komprehensif. Rendahnya jumlah publikasi bereputasi dari Indonesia, sebagaimana tergambar pada Tabel 1, menegaskan perlunya strategi yang mencakup pelatihan penulisan akademik berstandar internasional, *peer review* internal sebelum pengiriman ke jurnal, serta pendampingan oleh peneliti senior yang memiliki rekam jejak publikasi global (Miftah et al., 2018; Miftah et al., 2025a). Pemerintah dan lembaga pendidikan tinggi dapat berperan aktif dengan memberikan insentif finansial untuk publikasi di jurnal bereputasi tinggi, termasuk pembebasan biaya *article processing charge* (APC) untuk jurnal *open access* Q1–Q2.

Dalam konteks penguatan posisi Indonesia dalam literatur global, eksplorasi topik-topik baru yang masih jarang diteliti menjadi langkah pembeda yang strategis. Analisis kata kunci (Gambar 2) dan kluster tematik (Gambar 3) menunjukkan bahwa meskipun isu *tax administration* dan *financial management* dominan, riset di masa depan dapat diarahkan pada topik seperti dampak *digital government* terhadap efisiensi fiskal, peran *big data analytics* dalam pengawasan pajak, serta integrasi teknologi *blockchain* untuk meminimalkan risiko korupsi (Abdollahi et al., 2021; Colicchia et al., 2018). Fokus pada topik baru ini tidak hanya akan memperkuat kebaruan (*novelty*) penelitian, tetapi juga meningkatkan relevansi kebijakan dalam menghadapi tantangan era digital.

Selain itu, riset di masa depan juga perlu memperkuat dimensi kebijakan dan praktik. Pergeseran tematik menuju tata kelola kolaboratif berbasis digital yang teridentifikasi dalam penelitian ini membuka peluang bagi pemerintah untuk mengintegrasikan teknologi dalam setiap tahap pengelolaan keuangan publik. Penelitian mendatang dapat diarahkan untuk mengembangkan model kebijakan yang dapat diimplementasikan secara langsung oleh pemerintah daerah dan pusat, misalnya model *audit real-time* berbasis *machine learning* atau sistem penganggaran partisipatif digital yang memungkinkan keterlibatan masyarakat secara luas.

Peningkatan relevansi global juga dapat dicapai dengan mendorong keterlibatan aktif Indonesia dalam forum dan jaringan riset internasional. Minimnya kontribusi publikasi dari Indonesia berpotensi membatasi pengaruhnya dalam pembentukan standar dan praktik terbaik administrasi keuangan publik global. Oleh karena itu, akademisi Indonesia perlu lebih aktif mengikuti *policy dialogue*, *international working groups*, dan *standard-setting bodies* yang berkaitan dengan reformasi fiskal. Partisipasi semacam ini akan membuka peluang

untuk mengintegrasikan perspektif dan pengalaman Indonesia ke dalam kerangka kebijakan internasional. Agar temuan akademis dapat lebih berdampak, perlu dikembangkan mekanisme diseminasi hasil penelitian yang lebih efektif. Penyusunan *policy brief*, penyelenggaraan seminar kebijakan, dan publikasi populer berbasis temuan riset (Miftah et al., 2025b) dapat memastikan bahwa hasil penelitian tidak hanya tersimpan di jurnal akademik, tetapi juga menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan di sektor publik.

Dari sisi metodologis, riset mendatang disarankan untuk memanfaatkan pendekatan bibliometrik lanjutan dan analisis *big data* guna memantau perkembangan literatur secara *real-time*. Penggunaan metode seperti *temporal keyword analysis* atau *dynamic network mapping* akan memungkinkan peneliti mendeteksi pergeseran tren dan topik yang sedang naik daun dalam administrasi keuangan publik (van Eck & Waltman, 2009; Donthu et al., 2021), sehingga akademisi Indonesia dapat menempatkan diri di garis depan dalam mengembangkan topik riset sebelum menjadi arus utama.

Relevansi penelitian juga akan meningkat jika setiap studi administrasi keuangan publik mengintegrasikan evaluasi dampak kebijakan. Banyak kajian terdahulu fokus pada pemetaan atau analisis konseptual, sementara evaluasi empiris terhadap implementasi kebijakan sering kali terabaikan. Penelitian di masa depan dapat mengukur efektivitas reformasi fiskal berbasis teknologi digital terhadap efisiensi anggaran, transparansi, dan akuntabilitas publik (Abdollahi et al., 2021; Colicchia et al., 2018), sehingga menyediakan bukti ilmiah yang dapat digunakan pemerintah untuk merancang kebijakan adaptif.

Pada akhirnya, kebaruan dari studi ini terletak pada pemetaan global administrasi keuangan publik yang secara eksplisit menyoroti kontribusi Indonesia. Penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran kuantitatif mengenai tren publikasi, tetapi juga menawarkan analisis reflektif atas distribusi penulis, jurnal, kata kunci, dan kluster tematik yang membentuk arah riset di bidang ini. Dengan mengidentifikasi kesenjangan partisipasi negara berkembang dan peluang topik baru, studi ini menyediakan fondasi strategis bagi akademisi dan pembuat kebijakan untuk merumuskan agenda riset dan kebijakan yang relevan di era digital dan pasca-krisis global.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa administrasi keuangan publik merupakan bidang yang terus mengalami perkembangan baik secara konseptual, tematik, maupun metodologis. Melalui pendekatan bibliometrik terhadap 208 artikel ilmiah terindeks Scopus hingga pertengahan 2025, terungkap bahwa dinamika topik dalam studi ini

sangat dipengaruhi oleh konteks global seperti krisis ekonomi, desentralisasi fiskal, dan transformasi digital pemerintahan. Istilah seperti *public finance*, *fiscal policy*, dan *financial management* mendominasi literatur, mengindikasikan konsistensi perhatian terhadap efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara (Donthu et al., 2021; van Eck & Waltman, 2009). Seiring waktu, fokus penelitian bergeser dari isu administratif teknokratis menuju integrasi nilai-nilai tata kelola, seperti keadilan fiskal dan partisipasi publik. Desentralisasi fiskal menjadi salah satu tema penting, di mana kapasitas kelembagaan di tingkat lokal muncul sebagai tantangan utama untuk mewujudkan efisiensi anggaran dan pelayanan publik yang setara (Bryson & Cornia, 2006; Alexandru & Guziejewska, 2020). Pendekatan interdisipliner yang menghubungkan administrasi fiskal dengan sektor kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial turut memperlihatkan arah riset yang semakin kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Zhang, 2012).

Selain itu, teknologi informasi terbukti menjadi motor penggerak dalam pembaruan praktik administrasi keuangan publik. Implementasi sistem seperti *e-budgeting* dan *e-audit* di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia, telah membuka ruang bagi transparansi yang lebih luas dan pengendalian anggaran yang lebih ketat (Oktaviani & Kuntadi, 2023; Dei, 2024). Meski demikian, kesenjangan kapasitas teknologi, resistensi budaya birokrasi, dan belum selarasnya kerangka regulasi menjadi hambatan yang memerlukan solusi kebijakan terpadu dan adaptif (de Nichilo, 2024; Reed & Swain, 2012). Temuan-temuan ini secara keseluruhan mengindikasikan bahwa lanskap keilmuan administrasi keuangan publik berkembang ke arah yang lebih kolaboratif, terbuka, dan berbasis bukti, di mana keterlibatan multi-aktor, akademisi, pemerintah, lembaga internasional, hingga masyarakat sipil, menjadi kunci dalam mendorong inovasi kebijakan fiskal di era digital.

Implikasi dari temuan ini sangat luas. Pergeseran tematik menuju tata kelola kolaboratif berbasis teknologi menegaskan perlunya integrasi pendekatan berbasis data (*data-driven*) ke dalam seluruh siklus keuangan publik, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan. Bagi Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa strategi peningkatan kapasitas publikasi internasional dan perluasan jejaring kolaborasi global menjadi keharusan, mengingat kontribusi akademisi nasional dalam literatur masih relatif kecil. Selain itu, fokus multidisipliner yang ditemukan menuntut keterbukaan terhadap integrasi ilmu ekonomi, teknologi informasi, manajemen publik, dan ilmu politik dalam riset administrasi fiskal, sehingga dapat menghasilkan analisis yang lebih komprehensif. Dari sisi kebijakan, hasil studi ini dapat menjadi rujukan untuk merumuskan desain kebijakan keuangan publik

yang mengombinasikan inovasi teknologi, penguatan kelembagaan, dan partisipasi publik, guna menciptakan sistem keuangan publik yang inklusif, transparan, dan adaptif terhadap dinamika global.

Berdasarkan implikasi tersebut, penelitian ini merekomendasikan sejumlah langkah strategis. Pengembangan model kebijakan fiskal digital yang dapat diimplementasikan secara langsung, seperti *real-time audit system* berbasis *machine learning* atau *participatory budgeting platform* yang memungkinkan keterlibatan warga secara daring, menjadi salah satu prioritas. Selain itu, program nasional peningkatan kapasitas publikasi internasional, melalui pelatihan penulisan artikel Q1/Q2, pendampingan oleh peneliti senior, dan skema insentif publikasi, perlu segera diimplementasikan untuk memperkuat posisi akademisi Indonesia di jaringan pengetahuan global. Eksplorasi topik-topik baru seperti penggunaan *blockchain* dalam transparansi anggaran, penerapan *big data analytics* untuk pengawasan pajak, serta integrasi sistem fiskal dengan indikator pembangunan berkelanjutan (SDGs) dapat menjadi sumber kebaruan penelitian yang signifikan. Pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga riset juga perlu mendorong kolaborasi internasional berkelanjutan melalui *joint research grants*, pertukaran akademik, dan publikasi bersama, sehingga cakupan riset dapat diperluas sekaligus mempercepat adopsi praktik terbaik dari negara maju.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pemetaan komprehensif arah dan struktur literatur global administrasi keuangan publik yang secara eksplisit menyoroti kontribusi Indonesia. Studi ini tidak hanya memberikan gambaran kuantitatif mengenai tren publikasi, tetapi juga menawarkan analisis reflektif atas distribusi penulis, jurnal, kata kunci, dan kluster tematik yang memengaruhi arah riset di bidang ini. Dengan mengidentifikasi kesenjangan partisipasi negara berkembang dan peluang topik baru, penelitian ini memberikan fondasi strategis bagi akademisi dan pembuat kebijakan untuk memperkuat peran Indonesia dalam diskursus akademik dan kebijakan fiskal global di era digital dan pasca-krisis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdollahi, M., Hashemi, S., & Khajehnasiri, F. (2021). Bibliometric analysis and visual mapping of the scientific literature on occupational health and safety. *Safety and Health at Work, 12*(4), 452–461. <https://doi.org/10.1016/j.shaw.2021.07.004>
- Aazami, M., Parsanezhad, M. E., & Tavasoli, M. (2020). Mapping scientific research on medical informatics: A bibliometric and visualization study. *Health Information Science and Systems, 8*, 1–9. <https://doi.org/10.1007/s13755-020-00108-x>
- Alexandru, I., & Guziejewska, B. (2020). Fiscal decentralization and local government efficiency: Evidence from Poland and Romania. *Lex Localis, 18*(3), 409–429. [https://doi.org/10.4335/18.3.409-429\(2020\)](https://doi.org/10.4335/18.3.409-429(2020))
- Aswin, R., Ahad, D. S., Silitonga, R. E., & Gusparirin, A. (2022). Evaluasi Sistem Penganggaran Daerah: Studi Literatur Indonesia Pasca Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia, 9*(1), 50–67.
- Azizi, N. A., Mahmud, M. S., & Ibrahim, R. (2024). Enhancing public sector auditing with blockchain: A systematic review. *Journal of Public Administration and Governance, 14*(1), 90–106. <https://doi.org/10.5296/jpag.v14i1.20733>
- Bryson, P. J., & Cornia, G. C. (2006). Local government financing in the Slovak and Czech Republics: The role of political institutions. *Public Budgeting & Finance, 26*(1), 77–96. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5850.2006.00834.x>
- Bukhtiarova, A., Melikhov, D., & Borisov, V. (2019). E-government in developing countries: The case of Russia. *International Journal of Public Administration in the Digital Age, 6*(1), 1–21. <https://doi.org/10.4018/IJPADA.2019010101>
- Chandra, S., & Shukla, S. (2021). Global research trends in smart governance: A bibliometric and network analysis. *Government Information Quarterly, 38*(3), 101587. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101587>
- Ciancarini, P., Giancarlo, G., & Grimaudo, L. (2023). Ethical implications of fiscal transparency in the age of GovTech. *Sustainability, 15*(4), 2104. <https://doi.org/10.3390/su15042104>
- de Mello, L. (2000). Fiscal decentralization and intergovernmental fiscal relations: A cross-country analysis. *World Development, 28*(2), 365–380. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(99\)00123-0](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(99)00123-0)
- de Nichilo, S. (2024). Creative accounting and budgetary manipulation: Empirical analysis in the Italian public sector. *Public Budgeting & Finance, 44*(2), 135–157. <https://doi.org/10.1111/pbaf.12321>
- Dei, M. (2024). Big data and public budgeting: Challenges and opportunities. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 36*(1), 50–70. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-01-2023-0003>
- Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. *Journal of Business Research, 133*, 285–296. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.070>
- Dwinanda, F. R., Muharam, R. S., Miftah, A. Z.,

- Firmansyah, A., & Komara, S. R. (2023). Dampak Inovasi Teknologi Keuangan Publik Terhadap Akuntabilitas Dan Transparansi: Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 2023.
- Firmansyah, A., Maulana, R. Y., & Miftah, A. Z. (2024). Transformation of the procurement system in the Indonesian government. *Sosiohumaniora*, 26(2), 369-381.
- Garrido-Cardenas, J. A., Manzano-Agugliaro, F., & Mesa-Valle, C. (2020). Bibliometric analysis of worldwide scientific publications on COVID-19. *Sustainability*, 12(23), 9604. <https://doi.org/10.3390/su12239604>
- Grizzle, G. A. (2002). Performance-based budgeting: The US experience. *Public Organization Review*, 2(1), 3–19. <https://doi.org/10.1023/A:1013882429222>
- Gupta, M., Chircu, A. M., & Sundaram, D. (2018). Government innovation through open data: Creating the next generation of public administration. *Information Polity*, 23(2), 209–230. <https://doi.org/10.3233/IP-170051>
- IMF. (2017). *Fiscal Transparency Handbook*. International Monetary Fund. <https://www.imf.org/en/Publications/Manuals-Guides/Issues/2017/04/07/fiscal-transparency-handbook>
- Judijanto, J., Raharjo, K., & Darmawan, D. (2024). Integrasi transparansi fiskal dalam reformasi anggaran nasional. *Jurnal Manajemen Publik*, 8(1), 1–12. <https://doi.org/10.14710/jmp.v8i1.40182>
- Miftah, A.Z., Hesti, C.K., Sunarwibowo, A., & Khairani, A.F. (2018). Youth Travel Behaviour and Road Safety in Bandung. 2nd Conference of ASEAN Road Safety 2018, September 2019, 7–13.
- Miftah, A. Z., Hesti, C. K., Raharjo, M. A., & Khairani, A. F. (2021, February). Bandung sustainable urban mobility policy–angkot contribution on public transport emission. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 673, No. 1, p. 012029). IOP Publishing.
- Miftah, A. Z., Widianingsih, I., Hoe, C., & Afriandi, I. (2025a). Historical review of the Indonesian government's response to health crisis: From the Spanish flu to the COVID-19 pandemic. *One Health*, 101067.
- Miftah, A. Z., Widianingsih, I., Muhtar, E. A., & Sutriadi, R. (2025b). Dataset of Policy Actors During COVID-19 Pandemic Handling and Economic Recovery in Bandung City. *Data in Brief*, 111841.
- Mongeon, P., & Paul-Hus, A. (2016). The journal coverage of Web of Science and Scopus: A comparative analysis. *Scientometrics*, 106(1), 213–228. <https://doi.org/10.1007/s11192-015-1765-5>
- O'Connor, N. G., Chow, C. W., & He, X. (2020). Big data and analytics in government auditing: A comparative study. *Public Administration Review*, 80(4), 637–651. <https://doi.org/10.1111/puar.13183>
- Oktaviyani, R., & Kuntadi, A. (2023). Reformasi digital dalam tata kelola fiskal daerah di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 112–124. <https://doi.org/10.24843/jap.v15i2.56789>
- Ramos-Rodríguez, A. R., & Ruiz-Navarro, J. (2004). Changes in the intellectual structure of strategic management research: A bibliometric study of the Strategic Management Journal, 1980–2000. *Strategic Management Journal*, 25(10), 981–1004. <https://doi.org/10.1002/smj.387>
- Reed, B. J., & Swain, J. W. (2012). *Public finance administration* (2nd ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Sumaryana, A., Miftah, A. Z., Widianingsih, I., & Karlina, N. (2025). Turning over a new leaf: Post-Covid infrastructure development planning and financing strategies in the organizational environment of Bandung City. *Regional Science Policy & Practice*, 17(3), 100170.
- Sutriadi, R., & Miftah, A. Z. (2020). Upaya mendorong Kolaborasi menuju pengembangan struktur Ruang Bernuansa knowledge based di Era disrupsi. *TATALOKA*, 22(4), 643-662.
- van Eck, N. J., & Waltman, L. (2009). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. *Scientometrics*, 84(2), 523–538. <https://doi.org/10.1007/s11192-009-0146-3>
- Wallace, M. L., Larivière, V., & Gingras, Y. (2018). Modeling a century of citation distributions. *Journal of Informetrics*, 12(2), 497–510. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2018.03.004>
- Zalcewicz, A. (2023). Restoring trust in public institutions through fiscal technology. *International Journal of Public Sector Management*, 36(4), 557–573. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-07-2022-0163>
- Zhang, Y. (2012). Public budgeting and health care reforms in China. *Public Budgeting & Finance*, 32(2), 1–24. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5850.2012.00994.x>